

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Study ini akan menganalisis tentang “Pengaruh Kapasitas Aparatur Desa Terhadap Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Panggungharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul Pada Saat Pandemic Covid-19 Tahun 2020”. Pada umumnya desa tidak diurus secara langsung oleh negara sehingga menjadi suatu masalah tersendiri pada desa yang harus berusaha keras untuk penyelenggaraan pemerintahannya. Selain itu, desa memerlukan pendidikan kewarganegaraan yang dilakukan melalui pendekatan teknokratis untuk para aparatur desa. Pendekatan tersebut sering digunakan untuk mencegah terjadinya korupsi dan tentunya ada bantuan suatu kebijakan serta bentuk hukum. Desa tidak diurus secara langsung oleh negara dan terkadang terlambat mendapatkan tindakan lanjutan mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa membuat rata-rata desa mengurus rumah tangga desa sendiri.

Dalam Undang-Undang No.06 Tahun 2014 tentang desa yang merupakan adanya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah tertentu dengan wewenang dalam mengatur serta mengurus kepentingan masyarakat desa, hak asal usul yang telah diakui dan dihormati pada sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penyelenggaraan pemerintahan desa akan dilakukan oleh Aparatur Desa yakni Kepala Desa dan Perangkat desa lainnya (Mulyani, 2016).

Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa oleh aparatur desa diperlukan pula adanya kapasitas yang memadai, dikarenakan penyelenggaraan pemerintahan desa yang optimal akan sulit terwujud apabila kapasitas aparatur desa tidak memadai seperti dalam menjalankan tugas dan fungsi desa yang masih kurang optimal. Kapasitas itu sendiri dapat diartikan sebagai bentuk pengukur keterampilan dan kemampuan pegawai ketika menjalankan tugas dan fungsinya serta mengukur pencapaian kinerja terhadap target yang ingin diperoleh (Asrori, 2016).

Dari permasalahan dulunya pada tahun 2012 desa Panggungharjo masih kurang maksimal dalam mengelolah pemerintahan desanya dikarenakan minim nya pengetahuan masyarakat desa dan para aparatur terkait informasi pembangunan desa dan penyelenggaraan pemerintahan desa yang administrasi dilakukan secara mandiri tanpa ada tanggapan cepat dari pihak kabupaten membuat para aparatur desa Panggungharjo harus bekerja lebih giat lagi dalam mengelolah

pemerintahan desanya, kinerja aparat desa Panggungharjo yang berhasil dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yaitu pengelolaan aset desa hingga menjadi penghasilan desa yang sangat luar biasa. Bukan hanya pengelolaan aset desa yang mereka lakukan tetapi juga mengadakan program inovasi desa yang contohnya seperti KUPAS (Kelompok Usaha Pengelolaan Sampah) dan mengadakan koran desa serta website, yang mana koran tersebut dijadikan sebagai keterbukaan informasi dan ruang komunikasi terhadap masyarakat desa Panggungharjo.

Dalam pengelolaan aset desa menjadi penghasilan desa dilakukan melalui BUMDes Panggung Lestari yang diadakan sejak tahun 2013 oleh masyarakat dan aparat desa Panggungharjo hingga berkembang pesat sampai saat ini. Berkembangnya BUMDes Panggung Lestari membuat desa Panggungharjo mendapatkan penghargaan berupa desa inovatif dengan mengalahkan 72.000 desa di Indonesia, dengan keberhasilan yang diraih oleh desa Panggungharjo tersebut maka dapat dikatakan penyelenggaraan pemerintahan desanya yang dilakukan oleh aparat desa Panggungharjo terlaksana dengan baik (www.panggungharjo.desa.id).

Pada tahun 2020 ini permasalahan yang muncul di setiap desanya termasuk desa Panggungharjo yaitu mengenai perekonomian desa dimana merosotnya pasar desa, desa Panggungharjo ada sekitar 800 toko atau warung yang pemasarannya terhambat karena pandemic covid-19 dan pengelolaan potensi desa yang terhenti sementara waktu. Akan tetapi permasalahan mengenai perekonomian pasar desa dapat diatasi oleh para aparat desa Panggungharjo yang bekerja sama dengan Menteri Desa PDTT (Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi), seperti dalam mengatasi permasalahan tersebut diadakannya pasar online yang bernama pasardesa.id. Hal ini dilakukan agar perekonomian kembali optimal dan dengan adanya pasar online tersebut mampu menggerakkan kembali perekonomian pasar desa yang pendapatannya mencapai Rp 1,6 M sejak 25 hari dari hari pertama operasionalnya, pasar online tersebut kini telah dipegang dan dikelola oleh pihak BUMDes Panggung Lestari (<http://kec-sewon.bantulkab.go.id>).

Permasalahan lainnya yaitu terkait keterlambatan penyelesaian penyusunan APBDes, RPJMDes, dan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa lainnya dikarenakan ada laporan yang harus diubah untuk menyesuaikan kondisi desa pada saat pandemic covid-19. Terkait permasalahan ini tidak menjadi hal serius dikarenakan banyak desa di Indonesia juga mengalami hal yang sama. Meskipun terlambat dalam penyelesaian penyusunan laporan tersebut tidak mengurangi kualitas laporan yang transparan mengenai penyelenggaraan pemerintahan selama pandemic covid-19 tahun 2020.

Desa Panggungharjo terletak di Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Daerah istimewa Yogyakarta (DIY). Jumlah penduduk desa panggungharjo sebanyak 25.727 jiwa dengan luas wilayah desa sebesar 564,54 Ha, dengan 14 Dusun dan 199 RT. Desa Panggungharjo memiliki predikat desa unicorn dikarenakan BUMDes Panggung Lestari yang terbaik di Indonesia, serta salah satu program nya bernama KUPAS (Kelompok Usaha Pengelolaan Sampah) yang diadakan sejak tahun 2013. Program tersebut diadakan bukan hanya untuk memperbaiki perekonomian desa Panggungharjo pada saat itu tetapi juga untuk menurunkan volume sampah yang ada desa. Desa Panggungharjo dipimpin oleh Lurah Desa bernama Bapak Wahyudi Anggoro Hadi, S.Farm yang masa akhir jabatannya tahun 2024 (www.panggungharjo.desa.id).

Desa Panggungharjo termasuk desa mandiri serta inovatif dan desa yang menggunakan pendekatan teknokratis tersebut untuk melawan politik uang, dalam penyelenggaraan pemerintahan desa Panggungharjo yang salah satunya seperti mengelola aset desa menjadi penghasil desa yang dilakukan oleh aparatur serta pelayanan yang prima diberikan kepada masyarakat membuat masyarakat desa Panggungharjo percaya terhadap kewenangan pemerintahan desa Panggungharjo. Adanya kepercayaan masyarakat terhadap aparatur desa Panggungharjo membuat penyelenggaraan pemerintahan desa Panggungharjo menjadi sangat baik. (www.panggungharjo.desa.id).

Dengan melihat permasalahan desa Panggungharjo pada saat ini ditengah pandemic covid-19 serta aparatur desa yang mengatasi masalah tersebut hingga keberhasilan yang diraih dalam efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa mulai sejak tahun 2013 hingga saat ini yang salah satunya yaitu dalam pengelolaan aset desa hingga mengatasi masalah penurunan ekonomi pasar ditengah pandemi covid-19 tahun 2020 hingga saat ini yang membuat saya tertarik untuk menganalisis terkait **“Pengaruh Kapasitas Aparatur Desa Terhadap Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Panggungharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul Pada Saat Pandemic Covid-19 Tahun 2020”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut: **“Bagaimana Pengaruh Kapasitas Aparatur Desa Terhadap Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Panggungharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul Pada Saat Pandemic Covid-19 Tahun 2020?”**

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatasi maka tujuan penelitian ini yaitu “Untuk Mengetahui Pengaruh Kapasitas Aparatur Desa Terhadap Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Panggungharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul Pada Saat Pandemic Covid-19 Tahun 2020”.

D. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memperoleh manfaat praktis maupun teoritis.

1. Manfaat Praktis

- 1.1 Menjadi bahan rujukan bagi aparatur desa lain untuk mencontoh kinerja aparatur desa Panggungharjo Kecamatan Sewon yang berhasil dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang lebih baik.
- 1.2 Dapat mengetahui bahwa seberapa besar pengaruh kapasitas atau keterampilan aparatur desa terhadap keberhasilannya dalam penyelenggaraan pemerintahan desa Panggungharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul.

2. Manfaat Teoritis

- 2.1 Memberikan informasi tentang fungsi dan tugas pokok aparatur desa dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa Panggungharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul.
- 2.2 Memberikan informasi mengenai pengaruh kapasitas atau keterampilan aparatur desa dalam keberhasilan mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa Panggungharjo.
- 2.3 Sebagai pijakan dan referensi pada penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan pengaruh kapasitas aparatur desa terhadap efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa Panggungharjo.
- 2.4 Hasil penelitian dapat digunakan untuk pengembangan teori oleh Dosen dan Mahasiswa yang bisa didapatkan dalam perkuliahan khususnya pada mata kuliah yang berkaitan dengan penelitian.

E. Tinjauan Pustaka

Tabel 1.1
Tinjauan Pustaka

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Asrori (2016)	Kapasitas Perangkat Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Kabupaten Kudus	Dalam penyusunan, perencanaan, pelaksanaan peraturan desa dan keputusan Kepala Desa yang dilakukan oleh perangkat desa Kabupaten Kudus yang mana masih kurangnya kapasitas nya seperti: jumlah SDM aparatur desa yang masih minim, kurangnya tingkat pemahaman dalam pelaksanaan tugasnya. Kemampuan aparatur desa di Kabupaten Kudus dalam menyusun dokumen perencanaan dan penguasaan teknologi dalam melakukan pelayanan administrasi yang menjadi salah satu program penyelenggaraan pemerintahan masih dinilai kurang optimal.
2.	Siti Solihat (2017)	Pengaruh Kapasitas Aparatur Terhadap Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Studi di Wilayah Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang)	Pengaruh kapasitas aparatur terhadap efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa di Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang terdapat sebanyak 72,9% kriteria interpretasi koefisien determinasi nya. Ini menjelaskan bahwa pengaruh aparatur terhadap efektivitas penyelenggaraan

			<p>tersebutnya sedikit saja dikarenakan minim nya SDM aparatur serta pengetahuan mereka mengenai tugas pokoknya belum menguasai semua.</p>
3.	Ulima Islami (2016)	Kapasitas Aparatur Desa Dalam Tata Tertib Administrasi Desa	<p>Pemahaman aparatur desa terkait tata tertib administrasi desa sudah cukup memadai, akan tetapi inisiatif atau kemauan tersendiri aparatur untuk melakukan pengisian terhadap buku administrasi belum ada dan harus disuruh oleh atasan baru mereka melakukan hal itu dan ini yang menyebabkan kurangnya komunikasi antar aparatur di_ Desa Tiuh Tohou Kecamatan Tulang Bawang Kabupaten Tulang Bawang. Aparatur desa belum memiliki keterampilan dan ketangkasan yang lebih dalam tertib administrasi desa disebabkan oleh kurangnya peran dari Kepala Desa Tiuh Tohou dalam upaya peningkatan kapasitas aparatur desa terkait penyelenggaraan administrasi desa.</p>
4.	Steven Robert Bayaq, dkk (2018)	Analisis Kinerja Aparatur Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	<p>Kinerja aparatur desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa santan tengah telah terlaksana dengan efektif dikarenakan</p>

		Santan Tengah Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara	kemampuan aparatur yang awalnya minim akan tugas pokoknya lalu ditingkatkan lagi. Dengan kemampuan aparatur desa tersebut ditingkatkan lagi sehingga target encapaian penyelenggaraan pemerintahan desa santan tengah pun tercapai.
5.	Jaitun (2013)	Kinerja Aparatur Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Sepala Dalung Kecamatan Sesayap Hilir Kabupaten Tana Tidung	Aparatur desa sepala dalung saling bekerja sama agar dapat bertukar informasi terkait pengoptimalan pelayanan terhadap masyarakat sekitar, maupun program-program desa lainnya dalam penyelenggaraan pemerintahan yang efektif tentunya. Aparatur desa saling bekerja sama guna untuk saling mengingatkan satu sama lain agar dapat melaksanakan tugas pokok mereka masing-masing yang telah diatur dalam peraturan yang berlaku.
6.	Hendra Adi Saputra (2016)	Kinerja Aparatur dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa i Desa Teras Baru Kecamatan Tajung Palas Kabupaten Bulungan	Untuk menilai optimalnya suatu penyelenggaraan pemerintahan desa teras baru kecamatan tajung palas bisa dilihat dari aparatur desanya yang memiliki kedisiplinan, prestasi, keahlian, mampu berkerjasama dengan yang lain, dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugasnya

			masing-masing serta semua itu juga untuk kesejahteraan masyarakat pula. Pada penelitian ini semua hal yang ada pada kinerja aparatur desa teras baru dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sudah optimal.
7.	Linda Muchacha Paramitha, dkk (2013)	Kinerja Aparat Pemerintah Desa dalam Rangka Otonomi Desa (Studi i Desa Gulun, Kecamatan Maospati, Kabupaten Magetan)	Dalam pelaksanaan otonomi desa Gulun Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan, aparat pemerintahan desa masih mengalami kendalaseperti kurang disiplin nya kinerja aparat. Kedisiplinan kinerja aparat tersebut memang kurang akan tetapi tidak menutupi semangat mereka untuk merubah hal itu yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan otonomi desa Gulun Kecamatan Maospati, Kabupaten Magetan.
8.	Sahlan Saputra (2008)	Pengaruh Kemampuan Aparatur Desa Terhadap Efektivitas Pelaksanaan Program Pembangunan Desa i Desa Keupok Kabupaten Aceh Utara	Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa keupok yang efektif pastinya ada indikator penunjangnya seperti program pembangunan desa yang dilakukan oleh aparatur desa yang memiliki kemampuan dalam pelaksanaan tugasnya itu harus optimal. Pada penelitian ini desa Keupok Kabupaten Aceh Utara terdapatnya kemampuan aparatur desa yang masih minim sehingga

			<p>penyelenggaraan pemerintahan desa, kenapa demikian dari hasil penelitian ini terdapatnya keseimbangan antara kemampuan aparatur desa dengan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa yang mana jumlah persentasenya sama-sama 56%.</p>
9.	Haviz Lesmana (2017)	<p>Peningkatan Kapasitas Kepala Desa dan Aparatur Desa (Studi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Panggok Laut Kecamatan Lingga Kabupaten Lingga</p>	<p>Hasil penelitian ini bahwa Kepala desa dan Aparatur Desa Panggok Laut terkait kapasitas yang indikatornya pemahaman, keterampilan, dan kemampuan sudah mencapai tingkatan yang baik sehingga penyusunan perencanaan pembangunan dalam pengelolaan dana desa terlaksana dengan baik tanpa ada kendala yang serius. Untuk indikator pemahaman, keterampilan, dan kemampuan pada penelitian ini dijelaskan bahwa kepala desa dan aparatur nya sudah cukup menguasai dan memahami landasan-landasan dalam penyusunan serta pengelolaan dan desa terkait pembangunan desa.</p>
10.	Siti Aminah, dkk (2018)	<p>Analisis Tingkat Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa diKabupaten Bogor</p>	<p>Hasil penelitian ini bahwa tingkat kapasitas aparatur pemerintahan desa belum optimal dikarenakan mengenai pengetahuan dan</p>

			<p>keahlian pada pengelolaan keuangan, pembangunan desa, serta tata kelola pemerintahan desa masih minim.</p> <p>Perlunya peningkatan aparatur tersebut melalui peningkatan intensitas sosial Undang-Undang Desa beserta peraturan pelaksanaannya serta dilakukannya pula pelatihan agar kapasitas aparatur pemerintahan desa diKabupaten Bogor dapat meningkat dan berdampak pula pada penyelenggaraan pemerintahan desa yang lebih baik.</p>
--	--	--	--

Pembeda penelitian sebelumnya dengan penelitian saya yaitu pada subyek penelitian yang mana saya membahas mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa, akan tetapi pada penelitian sebelumnya membahas kapasitas perangkat desa. Untuk variabel independen dan dependen penelitian terdahulu dan sekarang sama-sama mengenai pengaruh kapasitas aparatur desa atau perangkat desa terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Pada penelitian terdahulu dilakukan oleh Asrori pada skripsi tahun 2016.

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui kapasitas perangkat desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa diKabupaten Kudus, penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan hasil penelitian yaitu dalam penyusunan, perencanaan, pelaksanaan peraturan desa dan keputusan Kepala Desa yang dilakukan oleh perangkat desa Kabupaten Kudus yang mana masih kurangnya kapasitas nya seperti jumlah SDM aparatur desa yang masih minim, kurangnya tingkat pemahaman dalam pelaksanaan tugasnya. Kemampuan aparatur desa di Kabupaten Kudus dalam menyusun dokumen perencanaan dan penguasaan teknologi dalam melakukan pelayanan administrasi yang menjadi salah satu program penyelenggaraan pemerintahan masih dinilai kurang optimal.

Pembeda penelitian ini dengan penelitian saya yaitu subjek penelitiannya yang berupa penyelenggaraan pemerintahan desa dan untuk penelitian saya berupa efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa pada saat pandemic covid-19, serta lokasi penelitian yang berbeda pula. Untuk metode penelitian yang saya gunakan yaitu kuantitatif sedangkan penelitian terdahulu menggunakan metode kualitatif, yang metode ini untuk menganalisis kemampuan aparatur desa dalam mencapai keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan desa di Kabupaten Kudus dan terhadap penelitian saya untuk mengukur pengaruh kemampuan atau kapasitas aparatur desa dalam mencapai efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa Panggunharjo pada pandemic covid-19.

Hasil dari penelitian ini ialah kemampuan aparatur desa yang telah mencapai kriteria yang diharapkan dengan besar persentase 56%, sedangkan untuk efektivitas pelaksanaan program pembangunan desanya juga mencapai target dengan persentase 56%. Analisis korelasi pada penelitian ini dengan berdasarkan pada perhitungan koefisien determinasi nya maka persentase untuk kemampuan aparatur desa dengan efektivitas pelaksanaan program pembangunan desa sebesar 58%. Ipotesis (H_0) ditolak dan (H_a) diterima yang mana ditinjau dari hasil uji pada t tabel ($13.37 > 1.66691$) maka dapat disimpulkan bahwa adanya pengaruh kemampuan aparatur desa dalam pelaksanaan program pembangunan desa dengan encapaian target yang tepat.

Pembeda penelitian sebelumnya dengan penelitian saya yaitu pada lokasi penelitian yang mana pada penelitian ini di desa Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang. Pada penelitian terdahulu dilakukan oleh Siti Solihat pada skripsi tahun 2017. Penelitian ini sama dengan penelitian saya yang menggunakan metode kuantitatif, metode tersebut digunakan untuk mengukur pengaruh kemampuan aparatur desa dalam mencapai efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa di Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang dan terhadap penelitian saya untuk mengukur pengaruh kemampuan atau kapasitas aparatur desa dalam mencapai efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa Panggunharjo pada pandemic covid-19 tahun 2020.

F. Kerangka Teori

1. Teori Kapasitas

1.1 Definisi Kapasitas

Menurut seorang pakar bernama Morgan (2010:10) bahwa kapasitas merupakan suatu keterampilan, pemahaman, keahlian, perilaku, nilai, tekad yang kuat, sumber daya, serta keadaan yang organisasi, individu, sektor kerja dengan sistemnya yang lebih kompleks dalam menjalankan fungsinya dengan tujuan agar pembangunan yang telah direncanakan dapat mencapai target. Kapasitas itu sendiri dapat diartikan sebagai bentuk pengukur keterampilan dan kemampuan pegawai ketika menjalankan tugas dan fungsinya serta mengukur pencapaian kinerja terhadap target yang ingin diperoleh (Asrori, 2016).

Sedangkan menurut pakar bernama Brown (2010:9) kapasitas merupakan suatu prosedur yang mampu mengoptimalkan kemampuan dan keterampilan individu atau organisasi agar tercapainya target yang diinginkan. Berdasarkan pengertian kapasitas oleh dua pakar tersebut bahwa terdapat tiga indikator pengukur kapasitas yaitu (Soeprapto, 2010):

- a) Pemahaman, yaitu mengetahui tentang penerapan tugas pokok dan fungsi.
- b) Keterampilan, yaitu terampil dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
- c) Kemampuan, yaitu berupaya dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

Menurut Wadianto (2016:20) kapasitas pada organisasi non pemerintah ataupun organisasi pemerintah menjadi potensi bagi institusi dalam mewujudkan penyelenggaraan program-program kegiatannya menjadi lebih optimal dan efektif.

1.2 Pengembangan Kapasitas

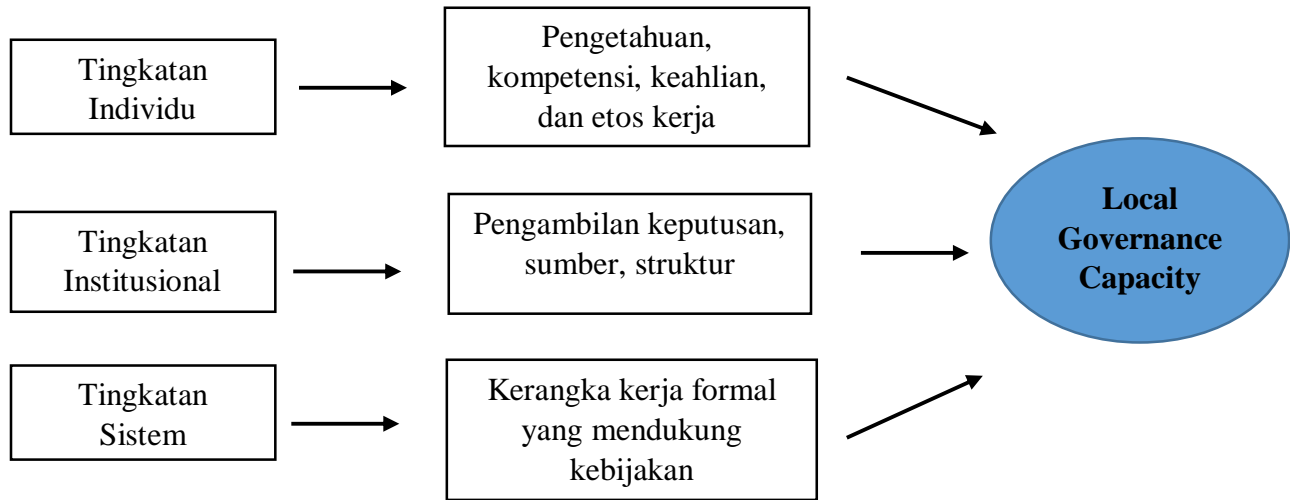
Menurut Rainer Rohdewohld (2005:11) bahwa pengembangan kapasitas atau disebut Capacity Building ialah proses mengoptimalkan atau meningkatkan keterampilan dan kemampuan suatu organisasi maupun individu guna untuk terwujudnya target yang diinginkan. Sedangkan menurut Gandara (2008:9) bahwa pengembangan kapasitas merupakan suatu proses dalam mengoptimalkan atau meningkatkan komunitas, organisasi, individu dengan tujuan agar terwujudnya target atau pencapaian yang diinginkan.

Menurut Agus (2011:155) bahwa pengembangan kapasitas merupakan sebagai proses untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan seseorang dalam suatu organisasi guna mencapai target yang diinginkan. Bukan hanya itu saja, pengembangan kapasitas juga diartikan sebagai suatu proses untuk meningkatkan kemampuan seseorang, suatu kelompok, organisasi, maupun masyarakat dalam menganalisa lingkungannya. Sedangkan menurut Tauhidi (2017) bahwa pengembangan kapasitas merupakan usaha untuk meningkatkan suatu strategi dalam memperoleh efisiensi terkait waktu dan sumber daya yang dibutuhkan agar tercapainya outcome (hasil yang diinginkan).

Bidang pemerintahan mengatakan bahwa pengembangan kapasitas atau capacity building dijadikan sebagai rencana yang strategis dalam meningkatkan efisiensi, efektivitas dan efisiensi dari kinerja pemerintah dengan memfokuskan pada pengoptimal dari berbagai aspek seperti sumber daya manusia (SDM), organisasi kerja, serta pembaharuan pada kelembagaan dan lingkungan (Keban, 2008).

Sedangkan menurut CIDA (Canandia International Development Agency) bahwa pengembangan kapasitas atau disebut capacity building adalah teknik yang digunakan untuk meningkatkan kemampuan individu atau organisasi, institusi, dan masyarakat agar dapat memperoleh kinerja yang optimal dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, serta mudah memahami dan memenuhi kebutuhan pembangunan yang sifatnya berkelanjutan (UNDP, 1998). Berikut ini gambar tingkat pola pengembangan:

Gambar 1.1 Tingkat Pola Pengembangan Capacity Building



(Sumber: Agus, 2011:157)

Dari gambar tersebut dapat diketahui bahwa dalam pengembangan kapasitas (capacity building) terdapat tiga tingkatan yaitu tingkat individu, sistem, dan institusional. Ketiga tingkatan ini dilakukan secara praktis dan berkelanjutan hingga memperoleh hasil yang berdampak pada Good governance sehingga pada pengembangan kapasitas dapat memperoleh pegawai yang sangat berkompeten dalam kapasitas. Berikut penjelasan ketiga tingkatan tersebut (Riyadi Soeprpto, 2017):

- a) Tingkat individu terkait peningkatan pengetahuan, kompetensi, keahlian, dan etos kerja oleh individu atau para pegawai yang bekerja.
- b) Tingkat institusional terkait peningkatan yang berkaitan dengan penciptaan perangkat struktur, budaya, serta pengelolaan suatu organisasi yang mendukung pegawai saat bekerja.
- c) Tingkat sistem terkait ada keterkaitan antara konteks atau lingkungan kerja dengan peraturan serta kebijakan yang telah ditentukan guna untuk mencapai objektivitas dari adanya kebijakan dan peraturan yang dibuat tersebut.

Berdasarkan ketiga tingkatan tersebut ada salah satu tingkatan yang dijadikan sebagai aspek upaya peningkatan kapasitas aparatur desa pada penelitian ini yaitu tingkatan yang berkaitan dengan pengetahuan, kompetensi, keahlian, dan etos kerja

yang mana semua itu ada pada tingkatan individu. Tingkatan individu digunakan pula sebagai alat ukur dalam penelitian ini.

Pertama, tingkatan individu terkait dengan pengetahuan terdiri pula dari beberapa aspek penunjangnya beserta penjelasannya sebagai berikut (Kencana, 2014):

- a) **Pemahaman prosedur kerja**, maksudnya bahwa individu atau pegawai dalam suatu organisasi memiliki kecakapan dalam menerima penjelasan berbagai prosedur kerja yang sering berubah-ubah sesuai kondisi lingkungan pekerjaan dan juga mampu memberikan penjelasan yang tepat serta kompleks terhadap rekan kerja mengenai prosedur kerja.
- b) **Aplikasi atau penerapan**, maksudnya bahwa individu atau pegawai memiliki penguasaan terhadap materi yang telah dipelajari pada kondisi atau situasi yang sebenarnya. Aplikasi juga dapat diartikan sebagai penggunaan metode, aturan, dan prinsip.
- c) **Analisis**, maksudnya individu atau pegawai yang memiliki kemampuan dalam menjelaskan materi atau topik dengan objek tertentu yang saling terkait satu dengan lainnya. Kemampuan analisis dapat terlihat pada saat mengelompokkan permasalahan, dan dapat membedakan atau memisahkan permasalahan yang diatasi dengan cara berbeda-beda.
- d) **Evaluasi**, maksudnya sebagai individu atau pegawai yang memiliki kemampuan dalam mengukur kinerjanya selama diberikan tugas dari atasan maupun sesama rekan kerja, hal ini dilakukan agar mengetahui sejauh mana progress kerja yang dilakukan.

Kedua, pada tingkatan individu terkait kompetensi yang meliputi beberapa aspek yaitu (Manopo, 2011:30):

- a) **Kompetensi Intelektual** yaitu kemampuan pegawai dalam suatu organisasi terkait penguasaan informasi mengenai prosedur kerja yang akan dilakukan, kemampuan dalam mencapai prestasi kerja dalam suatu organisasi, dan mampu berpikir konseptual mampu.

- b) **Kompetensi Adaptabilitas** yaitu kemampuan pegawai yang berkaitan dengan penyesuaian atau adaptasi dengan prosedur kerja baru dan memahami lingkungan atau kondisi kerja yang secara objektif, sehingga mampu mengatasi permasalahan yang terjadi ditempat bekerja. Pada kompetensi ini individu mampu mengendalikan diri, beradaptasi, serta mampu memberikan hasil kerja yang diinginkan.
- c) **Kompetensi manajemen** yaitu kemampuan pegawai yang berkaitan dengan manajemen pemberian pelayanan publik, pemeliharaan dan penjagaan aset, manajemen SDM (Sumber Daya Manusia), serta manajemen keuangan.
- d) **Kompetensi Sosial** yaitu kemampuan pegawai yang berkaitan dengan dapat bekerja sama dengan rekan kerja (team work) atau pihak lain agar dapat mencapai target yang diinginkan dan mengatasi permasalahan yang ada pada saat bekerja, kemampuan melakukan komunikasi sosial dengan rekan kerja organisasi pada saat pelaksanaan tugas pokok. Pada kompetensi ini adanya kesadaran berorganisasi dengan membangun hubungan kerja sama dengan pegawai lain, mengarahkan bawahan, mengikuti arahan pemimpin, serta sistem kerja tim. Kompetensi ini dibentuk berdasarkan dengan konsep diri, watak, dan pengetahuan sosial.
- e) **Kompetensi Interpersonal** yaitu kemampuan pegawai terkait mengolah staf atau rekan kerja, masyarakat dengan cara mampu mendekatkan diri dengan mereka agar adanya keterbukaan komunikasi antar satu sama lain.
- f) **Kompetensi teknis** yaitu kemampuan pegawai terkait penggunaan peralatan pendukung kerja seperti penggunaan komputer atau alat elektronik lainnya.

Ketiga, tingkatan individu terkait dengan keahlian terdiri pula dari beberapa aspek beserta penjelasannya sebagai berikut (Kencana, 2014):

- a) **Keahlian administratif** yaitu kemampuan dalam mencatat, mengurus, serta mengatur informasi yang diperoleh dari hasil yang dicapai, kemampuan untuk mengetahui adanya hambatan pada saat mengikuti suatu prosedur atau kebijakan.
- b) **Keahlian konseptual** yaitu kemampuan untuk melakukan penggabungan serta mengoordinasikan berbagai aktivitas atau kegiatan organisasi, kemampuan

menganalisa informasi yang diperoleh dari berbagai sumber, mampu memahami bagaimana jalinan hubungan secara keseluruhan antara bagian dengan unit, adanya antisipasi apabila terjadi suatu perubahan dalam hubungan bagian dengan unit.

- c) **Keahlian teknik** yaitu penguasaan yang spesifik dalam pelaksanaan tugasnya dengan menggunakan teknik atau prosedur lapangan yang dispesialisasi secara tepat.
- d) **Keahlian hubungan manusia atau diagnostik** yaitu kemampuan dalam perihal memotivasi dan memahami rekan kerja apabila mengalami kesulitan dalam menyelesaikan pekerjaannya.

Ke-empat, tingkatan individu terkait dengan etos kerja terdiri pula dari beberapa aspek beserta penjelasannya sebagai berikut (Soeprapto, 2017):

- a) **Kerja keras**, untuk mencapai sasaran atau target dengan memanfaatkan waktu seoptimal mungkin.
- b) **Disiplin**, untuk menghargai serta mematuhi peraturan yang diberlakukan baik itu secara tertulis maupun tidak tertulis dan mampu melaksanakannya serta menerima sanksi apabila melanggar peraturan tersebut.
- c) **Bertanggung jawab**, apabila diberikan tugas atau pekerjaan dengan tempo waktu yang telah ditentukan maka pegawai harus menyelesaikan tugas tersebut dengan tepat pada waktunya.
- d) **Tekun**, Mampu mencapai target yang telah ditentukan sebelumnya serta mampu mengatasi permasalahan yang terjadi pada saat pencapaian target pekerjaan.

2. Teori Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintahan

2.1 Efektivitas

Menurut James A.F (2013) efektivitas merupakan kemampuan untuk menetapkan target yang ingin diperoleh, apabila target yang ingin diperoleh tersebut tidak berhasil didapatkan dengan waktu telah ditentukan maka dapat mengakibatkan pekerjaan menjadi tidak efisien. Sedangkan menurut Siagan (2002) bahwa efektivitas itu merupakan terwujudnya target yang telah ditentukan sebelumnya dengan waktu yang

tepat dan memanfaatkan sumber-sumber yang telah diperuntukkan untuk menyelenggarakan bermacam-macam kegiatan.

Efektivitas merupakan pencapaian kerja yang optimal dengan kuantitas, kualitas, serta waktu yang tepat. Pada pencapaian kerja yang optimal dan efektif sudah menjadi tujuan atau target yang diinginkan dengan tahap awal melakukan rencana (Sedaryamanti, 2000). Sedangkan menurut Ilza Maazi (2016:283) bahwa efektivitas berupa rancangan yang penting untuk menggambarkan pencapaian seseorang terhadap target. Pada KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) efektivitas ialah adanya persamaan antara pelaksanaan tugas yang dilakukan seseorang dengan hasil yang diperoleh, serta adanya suatu institusi atau lembaga yang telah berhasil memperoleh dan mengeksplotasi sumber daya dalam usaha mewujudkan target yang diinginkan (Mulyasa, 2010).

Efektivitas organisasi merupakan sejauh mana kualitas suatu lembaga yang menjadi sistem sosial dengan sumber daya serta sarana yang telah disediakan guna untuk memenuhi pencapaian target tanpa terjadinya pemborosan disetiap anggota pada lembaga tersebut. Efektivitas juga menjadi suatu strategi yang pasti untuk memperoleh target, keahlian, serta penggunaan tenaga manusia. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas yaitu (Robbins, 2006):

- a) Adanya tujuan yang jelas
- b) Adanya sumber daya manusia (SDM)
- c) Adanya struktur organisasi
- d) Partisipasi serta dukungan dari masyarakat
- e) Adanya tingkatan penilaian yang dianut

2.2 Pengukur Efektivitas

Menurut Siti Solihat (2017) bahwa ada beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengukur efektivitas suatu lembaga yaitu:

- a) **Kepastian Hukum**, maksudnya tindakan yang dilakukan oleh suatu organisasi harus mengutamakan landasan peraturan dalam pekerjaan yang dilakukan.
- b) **Kebijakan manajemen**, maksudnya kebijakan yang dilakukan oleh suatu organisasi dalam melaksanakan tugas atau pekerjaan seperti pemberian pelayanan publik, pemenuhan dan penjagaan aset dalam suatu organisasi, adanya

kebijakan manajemen keuangan dalam suatu organisasi dengan transparan dana yang digunakan untuk berbagai hal yang berkaitan dengan kepentingan pekerjaan dalam suatu organisasi.

- c) **Sistem monitoring dan evaluasi yang sifatnya mendidik**, maksudnya ketika suatu organisasi melaksanakan tugas nya perlu pemantauan dan evaluasi agar terkontrolnya pekerjaan mereka dan apabila terjadi kesalahan pada pelaksanaan tugas tersebut maka organisasi dapat belajar dari kesalahan tersebut agar kedepannya tidak terjadi lagi kesalahan yang sama.
- d) **Melakukan penyusunan program kegiatan yang tepat**, maksudnya dalam pelaksanaan kegiatan yang tepat oleh suatu organisasi terlebih dahulu dilakukannya rancangan atau susunan program nya. Apabila tidak adanya rancangan atau susunan terlebih maka dapat membingungkan para organisasi untuk melaksanakan kegiatannya.
- e) **Tersedianya sarana dan prasarana**, maksudnya ada beberapa fasilitas yang menunjang terwujudnya efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa yang dilaksanakan oleh suatu organisasi.
- f) **Koordinasi satu arah**, maksudnya bahwa adanya pemerian langsung tugas dari atasan (Lurah desa) ke bawahan dan pemberian tugas yang diberikan harus adil dalam suatu organisasi.
- g) **Adanya penyelenggaraan kepentingan umum**, maksudnya bahwa suatu organisasi melakukan berbagai hal terkait penyelenggaraan pemerintahan desa agar terwujudnya kesejahteraan masyarakat seperti pemenuhan kebutuhan masyarakat melalui pemberian pelayanan publik dan peningkatan potensi desa.

Pengukuran terhadap efektivitas pelaksanaan program yang berkaitan dengan pemerintahan desa dilakukan oleh suatu aparat desa untuk mengukur sejauh mana kemampuan dan keterampilan mereka dalam melaksanakan program kegiatan pemerintah desa serta melakukan inovasi.

2.3 Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Pada hakikatnya penyelenggaraan pemerintahan desa tidak dapat dipisahkan dengan penyelenggaraan otonomi daerah. Untuk pemerintahan desa memang telah menjadi aspek utama dan terpenting dalam tercapainya keberhasilan pelayanan kepada masyarakat. Adanya penyelenggaraan pemerintahan desa bukan semata-mata hanya untuk kelancaran pemberian dan perluasan jaringan pelayanan terhadap masyarakat, tetapi juga untuk memperlancar program pembangunan desa serta menyalurkan aspirasi dan inspirasi masyarakat terkait kebutuhan mereka agar terwujudnya yang namanya kesejahteraan masyarakat (Siti Sholihat, 2017).

Menurut Widjaja (2003) bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan sistem penyelenggaraan desa guna untuk mengatur dan mengurus masyarakatnya sendiri. Berbicara mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa bahwa terdapatnya beberapa asas yang telah dijelaskan dalam Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Pasal 42 yaitu:

- a) Tertib penyelenggaraan pemerintahan
- b) Tertib kepentingan umum
- c) Kepastian hukum
- d) Proporsionalitas
- e) Professionalitas
- f) Efisiensi dan efektivitas
- g) Akuntabilitas
- h) Partisipasi
- i) Kearifan lokal
- j) Kepastian hukum
- k) Keterbukaan

Terwujudnya suatu pemerintahan daerah yang efektif dan efisien itu dikarenakan oleh adanya efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa, sebab pada pemerintahan desa seperti pelayanan, pemberdayaan masyarakat, serta pembangunan daerah lebih dibutuhkan oleh masyarakat yang masih tinggal di daerah paling lemah atau pelosok seperti desa (Ndhara, 2003). Administrasi Pada penyelenggaraan pemerintahan desa terdapat beberapa asas yaitu:

- a) **Kepastian Hukum**
Merupakan asas yang mengutamakan landasan peraturan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
- b) **Tertib Penyelenggaraan Pemerintahan**
Merupakan asas yang menjadi landasan keteraturan, keselarasan, serta keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan pemerintahan desa.
- c) **Tertib Kepentingan Umum**
Merupakan asas yang mendahulukan kesejahteraan masyarakat desa.
- d) **Keterbukaan**
Merupakan asas yang membuka hak masyarakat desa untuk memperoleh informasi yang benar dan terpercaya.
- e) **Proporsional**
Merupakan asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dengan kewajiban penyelenggaraan pemerintahan desa.
- f) **Profesionalitas**
Merupakan asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan.
- g) **Akuntabilitas**
Merupakan asas yang menentukan bahwa setiap penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggung jawabkan terhadap masyarakat desa yang tentunya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan.
- h) **Efektivitas dan efisien**
Efektivitas dan efisien merupakan asas yang mengenai dampak kesejahteraan masyarakat desa yang dijadikan sebagai sasaran tepat oleh pemerintahan desa.

Efisien merupakan asas yang menyelenggarakan kebutuhan masyarakat desa sesuai dengan rencana yang telah disusun oleh pemerintahan desa.

i) Kearifan lokal

Merupakan asa yang menegaskan bahwa dalam penetapan kebijakan publik disuatu desa harus memperhatikan terlebih dahulu kebutuhan serta kepentingan masyarakat desa.

j) Keberagaman

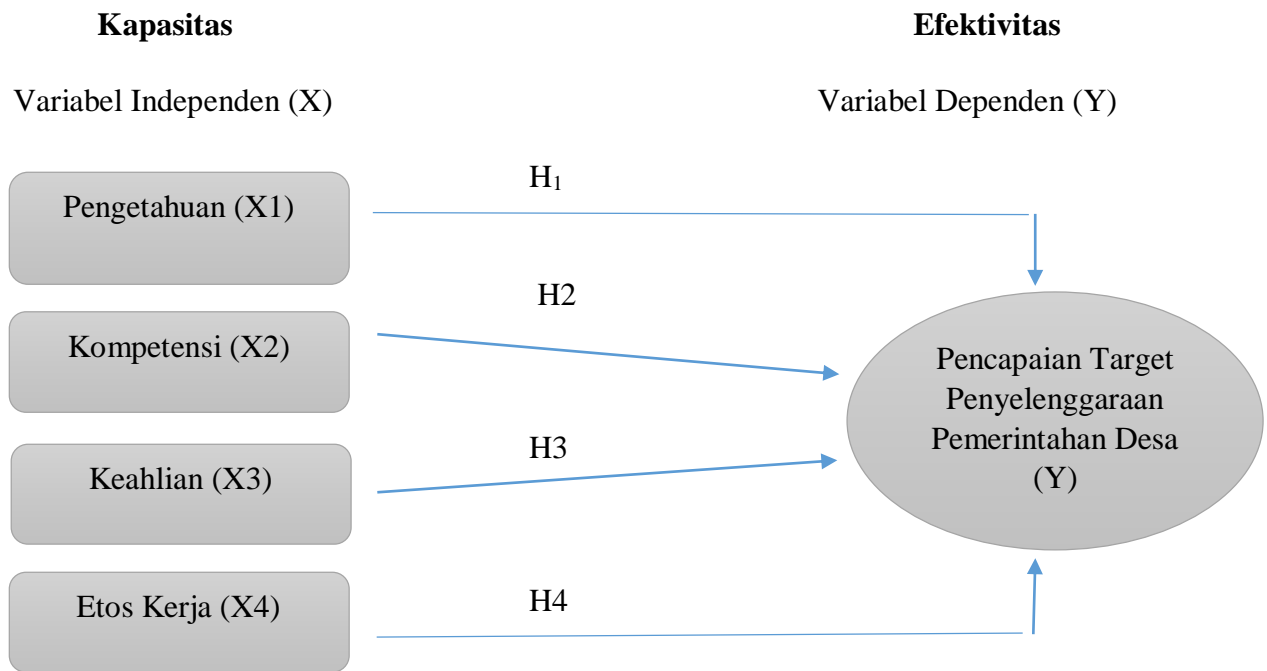
Merupakan penyelenggaraan pemerintahan desa yang tidak boleh mendiskriminasi kelompok masyarakat tertentu.

k) Partisipasi

Merupakan penyelenggaraan yang mengikut-sertakan pemerintahan desa dan masyarakat desa.

G. Kerangka Pemikiran

Gambar 1.2
Kerangka Pemikiran



H. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terkait rumusan masalah peneliti yang dinyatakan dalam bentuk suatu pernyataan (Sugiyono, 2013). Berdasarkan permasalahan diatasi maka peneliti merumuskan hipotesisnya sebagai berikut:

H1: Pengetahuan (X1) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Pencapaian Target Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Y)

H2: Kompetensi (X2) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Pencapaian Target Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Y)

H3: Keahlian (X3) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Pencapaian Target Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Y)

H4: Etos Kerja (X4) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Pencapaian Target Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Y).

I. Definisi Konseptual dan Operasional

1. Definisi Konseptual

Definisi konseptual merupakan adanya batasan terkait setiap variabel masalah yang dijadikan sebagai pedoman dalam penelitian sehingga dapat memudahkan para penulis atau eneliti untuk langsung penelitian dilapangan. Pada penelitian ini maka ada beberapa definisi konseptual yaitu:

1.1 Kapasitas Aparatur Desa (X)

Kapasitas merupakan suatu keterampilan, pemahaman, keahlian, perilaku, nilai, tekad yang kuat, sumber daya, serta keadaan yang organisasi, individu, sektor kerja dengan sistemnya yang lebih kompleks dalam menjalankan fungsinya dengan tujuan agar pembangunan yang telah direncanakan. Indikator pengukur kapasitas aparatur desa yaitu (Siti Solihat, 2017):

a) Pengetahuan

Yaitu penguasaan terhadap segala materi atau informasi yang spesifik dengan berbagai aspek pendukung atau penunjangnya yaitu pendidikan, pengalaman, pelatihan, serta pemahaman.

b) Keahlian

Yaitu kemampuan aparatur desa dalam mengerjakan serta menyelesaikan tugas baik itu tugas fisik maupun mental.

c) Kompetensi

Yaitu suatu kemampuan aparatur desa dalam melakukan tugasnya.

d) Etos Kerja

Yaitu bagian yang patut menjadi perhatian dalam keberhasilan suatu perusahaan.

1.2 Pencapaian Target Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Y)

Pencapaian kerja yang optimal dengan kuantitas, kualitas, serta waktu yang tepat. Pada pencapaian kerja yang optimal dan efektif sudah menjadi tujuan atau target yang diinginkan dengan tahap awal melakukan rencana (Sedaryamanti, 2000).

1.3 Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan mengoperasikan konstruk yang dipelajari untuk menjadi variabel yang dapat diukur sehingga eneliti dapat melakukan replikasi pengukuran dengan cara yang sama dalam mengembangkan pengukuran tersebut (Sugiyono, 2014).

Tabel 1.2 Definisi Operasional

Variabel	Indikator	Sub-indikator
Kapasitas Aparatur (X)	Pengetahuan (X1)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemahaman prosedur kerja 2. Aplikasi atau penerapan kerja 3. Analisis permasalahan kerja 4. Evaluasi progres kerja
	Kompetensi (X2)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mempunyai kompetensi intelektual 2. Mempunyai kompetensi Adabtabilitas 3. Mempunyai kompetensi manajemen 4. Mempunyai kompetensi sosial 5. Mempunyai kompetensi interpersonal

		6. Mempunyai kompetensi teknis
	Keahlian (X3)	1. Memiliki keahlian administratif 2. Memiliki Keahlian konseptual 3. Memiliki Keahlian teknik 4. Memiliki Keahlian Hubungan Manusia atau diagnostik
	Etos Kerja	1. Kerja keras untuk pencapaian target. 2. Disiplin dalam bekerja 3. Bertanggung jawab terhadap pekerjaan yang dilakukan 4. Tekun dan rajin bekerja
Efektivitas (Y)	Pencapaian Target Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1) Kepastian hukum 2) Kebijakan manajemen 3) Sistem monitoring dan evaluasi yang mendidik 4) Melakukan penyusunan program kegiatan yang tepat 5) Tersedianya sarana dan prasarana 6) Koordinasi satu arah 7) Adanya penyelenggaraan kepentingan umum

J. Metode Penelitian

Menurut Sugiono (2011:3) metode penelitian merupakan cara ilmiah atau alat bantu untuk memahami objek yang menjadi sasaran penelitian dan mendapatkan data yang valid dengan tujuan ditemukan, dibuktikan, dan dikembangkan suatu pengetahuan tertentu sehingga mudah digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah dalam bidang administrasi.

K. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif dimana pada penelitian ini lebih menekankan pada data-data yang numerik (angka) dan dikelola menggunakan metode statistik.

Penelitian kuantitatif dapat dilihat dari segi penelitian dan tujuan yang akan digunakan untuk pengujian di teori, dan dalam penelitian ini juga menyajikan suatu fakta dan mendeskripsikan suatu statistik yang disajikan. Kemudian ada pula pendekatan asosiatif yang digunakan untuk mencari hubungan antar variabel serta untuk membuktikan hipotesis pada dua atau lebih variabel penelitian (Subana dan Subraja, 2005:25).

Penelitian ini menjelaskan hubungan antar dua variabel yaitu variabel dependen dan independen, tidak saja dalam bentuk sebab akibat namun juga ada timbal balik antar variabel. Dengan menggunakan ini maka peneliti dapat menjelaskan mengenai hubungan variabel yang mana independen terdiri dari **Kapasitas Aparatur Desa** dan variabel dependen terdiri dari **Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa**.

L. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian berada di Kantor Desa Panggungharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

M. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua yaitu:

1. Data Primer

Menurut wijaya (2013:5) data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung tetapi data tersebut masih bersifat masih baku atau mentah, belum mampu memberikan informasi dalam mengambil keputusan terkait penelitian yang perlu diolah lebih lanjut. Pada data ini dapat diperoleh dari hasil kuesioner yang telah disebarakan kepada para responden yaitu aparatur desa Panggungharjo terkait pengaruh kapasitas aparatur desa yang bisa mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan Desa Panggungharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul Pada Saat Pandemic Covid-19 Tahun 2020.

2. Data Sekunder

Menurut Sugiyono (2013) bahwa data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung oleh eneliti, data sekunder dapat diperoleh dengan cara melakukan dokumentasi seperti sumber datanya dari website Desa Panggungharjo, media online, literature review, jurnal, media cetak, buku-buku dan lain-lain. Pada data ini eneliti

membutuhkan data sekunder dari jurnal-jurnal tentang pengaruh kapasitas aparatur desa terhadap efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa

N. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan tata cara yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data yang faktual terkait variabel yang dijadikan untuk penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu:

1. Observasi

Menurut Tersiana (2018) bahwa observasi merupakan dilakukannya pengamatan menyeluruh secara langsung pada lokasi penelitian. Observasi dilakukan secara langsung di Kantor Desa Panggunharjo untuk melihat berbagai kegiatan atau prosedur kerja aparatur desa pada saat pandemic covid-19.

2. Kuesioner

Pada penelitian ini, teknik pengumpulan data yang dipakai menggunakan kuesioner. Dimana kuesioner merupakan sebuah cara mengumpulkan data yang diinginkan dengan cara memberikan serangkaian pertanyaan yang tertulis administrasi kepada pihak atau responden yang dituju (Sugiyono, 2013). Dalam penelitian kuantitatif, menggunakan kuesioner merupakan hal yang umum digunakan administrasi oleh eneliti untuk memperoleh data yang mereka inginkan. Adapula kemudahan yang diperoleh jika menggunakan metode ini.

Didalam kuisioner, bisanya akan ada jawaban yang sudah tersedia, Sehingga responden dapat menjawab pertanyaan dengan mudah. Kemudian bagi peneliti juga mendapat kemudahan, peneliti dengan mudah mengelompokkan jawaban yang ada dengan jawaban yang diberikan oleh responden. Kuesioner yang digunakan eneliti merupakan jenis kuesioner yang terstruktur dan tertutup, dimana daftar pertanyaan yang ada akan dijawab menggunakan skor. Berikut merupakan tabel penilaian atau skor yang digunakan ketika menjawab pertanyaan yang digunakan dalam penelitian (Raharja, dkk, 2018):

Tabel 1.3
Skor Penilaian

Jenis JawabKan	Skor
Sangat Tidak Setuju	1
Tidak Setuju	2
Biasa aja	3
Setuju	4
Sangat Setuju	5

(Sumber: Raharja, dkk, 2018)

3. Tinjauan Kepustakaan

Untuk memperkuat jawaban dari responden, maka peneliti menggunakan data tambahan administrasi dari berbagai jurnal, buku, dan dokumen dokumen yang berhubungan dengan topik penelitian. Sehingga data yang disajikan benar-benar valid dan sesuai dengan kenyataan yang ada. Tinjauan pustaka yang digunakan pada penelitian ini yaitu Perdes No.09 Tahun 2016 tentang Tata Kerja Pemerintahan Desa Panggungharjo, laporan penyelenggaraan pemerintahan desa Panggungharjo tahun 2018-2019, jurnal-jurnal dan skripsi yang berkaitan dengan “pengaruh kapasitas aparatur desa terhadap efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa”.

O. Teknik Pengelolaan dan Analisis Data

Tahap analisis data merupakan proses dalam mengatur susunan atau urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu kategori dan satuan uraian dasar (Moleong, 2005). Dengan adanya teknik ini dapat memudahkan peneliti dalam mengelola data yang telah didapatkan sebelumnya, selain itu memungkinkan peneliti memiliki gambaran atau patokan yang jelas terkait proses analisis data.

Pada penelitian ini menggunakan analisis data kuantitatif. Pada analisis ini diperlukan untuk memecahkan permasalahan yang diteliti, hal ini dikarenakan kegiatan untuk menganalisis data tersebut diperlukan ketepatan untuk mengetahui pengaruh kapasitas aparatur desa terhadap efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa Panggungharjo pada saat pandemic covid-19 tahun 2020.

1. Pengelompokan dan Reduksi data

Pada tahap ini, dimana peneliti menyeleksi data (reduksi data) yang telah didapatkan yang sesuai dengan kebutuhan peneliti tersebut, pada tahap ini pula peneliti mengelompokkan serta menyeleksi data sesuai dengan jenis datanya. Maka hal ini dapat memberikan kemudahan dalam batasan pembahasan penelitian sehingga tulisan ini lebih sistematis, peneliti juga melakukan pengelompokan serta klasifikasi data yang diperoleh dari lapangan maupun dari tinjauan literature supaya sesuai dengan kebutuhan peneliti.

2. Analisis Data

Setelah dilakukannya pengelompokan data dan reduksi data, maka selanjutnya dilakukan dengan analisis data kuisisioner yang mana pada penelitian ini data kuisisioner dianalisis menggunakan Analisis Partial Square (PLS) dengan alat bantuannya yaitu SmartPLS 3.0. PLS merupakan salah satu metode alternative statistic Structural Equation Modelling (SEM) berbasis varian yang didesain untuk menyelesaikan regresi ganda ketika terjadi permasalahan pada data, seperti ukuran sampel peneliti kecil, ataupun data yang hilang.

Alasan peneliti menggunakan SEM-PLS karena keunggulan SEM-PLS seperti informasi yang dihasilkan efisien dan mudah di interpretasikan terutama pada model yang ipotesis model. Walaupun dengan sampel yang kecil SEM-PLS mampu untuk dijalankan, apalagi dengan sampel yang besar sehingga SEM-PLS sangat sesuai dengan yang digunakan pada penelitian ini. Yang paling penting bahwa penggunaan SEM-PLS tidak terlalu rumit (Halimah, 2017).

3. Populasi dan Sampel Penelitian

a. Populasi

Populasi merupakan generalisasi yang terdiri dari obyek atau subyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian disimpulkan (Sugiyono: 2014). Keseluruhan dari bagian yang dianalisis dalam penelitian juga dapat disebut sebagai populasi. Adapun populasi dari penelitian ini adalah keseluruhan aparatur desa Panggungharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul yaitu berjumlah 39 pegawai.

b. Sampel

Sampel merupakan hal yang digunakan untuk menunjukkan sifat suatu kelompok besar atau juga dapat diartikan sebagai bagian kecil yang mewakili kelompok. Apabila populasi penelitian berjumlah kurang dari 100, maka sampel dapat diambil yaitu keseluruhan populasi yang ada. Peneliti menggunakan *non probability sampling*. Dimana *non probability sampling* merupakan teknik pengambilan data atau sampel yang tidak memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur atau populasi untuk dipilih menjadi sampel. Dan jenis yang digunakan merupakan jenis *sampling jenuh* yang menentukan sampel penelitian dengan menggunakan semua populasi yang ada, dengan melihat laporan data yang masuk langsung dari website desa Panggunharjo bahwa Aparatur desa berjumlah sebanyak 39 orang.

4. Uji Kualitas Data

Uji ini digunakan untuk penyajian data responden yang telah terkumpul, setelah itu dilakukannya perhitungan guna untuk menjawab perumusan masalah penelitian ini dan menguji hipotesis yang telah dijelaskan sebelumnya pada penelitian ini.

a. Uji Validitas

Uji Validitas adalah metode atau instrumen ukur tingkat keabsahan dan keandalan dari data responden. Pengukuran ini dapat dikatakan valid apabila instrumen pengukurnya benar-benar tepat terhadap apa yang diukur, pada pengukuran ini dapat menggunakan aplikasi SEM-PLS (Sugiyono, 2009).

$$r_{xy} = \frac{N \sum XY - (\sum X) (\sum Y)}{\sqrt{\{N \sum X^2 - (\sum X)^2\} \{N \sum Y^2 - (\sum Y)^2\}}}$$

Keterangan:

r_{xy} : Koefisien Korelasi

Σxy : Jumlah Perkalian antara X dan Y

ΣX^2 : Jumlah Kuadrat X

Σy^2 : Jumlah Kuadrat Y

$(\Sigma x)^2$: Jumlah nilai X yang akan dikuadratkan

$(\Sigma y)^2$: Jumlah nilai Y yang akan dikuadratkan

N : Sampel

b. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas yaitu instrument pengukur yang dilakukan setelah memperoleh data yang valid dari uji validitas, apabila data yang di uji validitas tidak valid maka akan sulit untuk dilakukan pada tahap uji ini. Untuk pengukuran data pada uji ini menggunakan rumus *Alpha Cronbach* dengan bantuan SEM-PLS.

$$r_{11} = \frac{k}{k-1} \times \left\{ 1 - \frac{\sum S_i}{S_t} \right\}$$

Keterangan:

r_{11} : Nilai reliabilitas

$\sum S_i$: Jumlah varian skor tiap-tiap item

S_t : Varian total

k : Jumlah item

c. Uji Regresi

Pengujian ini merupakan pengukuran dengan menggunakan variabel yang jumlahnya dua atau lebih yang akan dinyatakan dalam bentuk hubungan atau fungsi, berikut ini rumus uji regresi (Kurniawan, 2016):

$$Y = a + bX$$

Keterangan

Y: variabel dependen

X: variabel independen

a: konstanta

b: koefisien regresi

n: jumlah pengamat

ΣX : jumlah variabel X

ΣY : jumlah variabel Y

Untuk mencari rumus a dan b yaitu:

$$b = \frac{(n)(\Sigma XY) - (\Sigma X)(\Sigma Y)}{(n)(\Sigma X^2) - (\Sigma X)^2}$$

$$a = \frac{\Sigma Y - b(\Sigma X)}{n}$$

d. Uji Hipotesa

Pengujian ipotesis antar variabel dilakukan oleh variabel independen (Kapasitas) terhadap variabel dependen (Pencapaian Target Penyelenggaraan Pemerintahan Desa) dengan menggunakan metode sampling bootstrapping pada aplikasi Smart PLS ketika telah mengetahui valid dan reliabelnya suatu data. Statistik uji yang digunakan yaitu statistic t dengan nilai t perbandingan dalam penelitian ini yang di peroleh dari tabel t. Pengujian dikatakan signifikan apabila T- statistik nilainya $> 1,96$ dan nilai P values $< 0,05$ (Haryono, 2017).